

Sahabat Sosial

Jurnal Pengabdian Masyarakat

Sosialisasi dan Pendampingan Kadet S1 Sejarah Militer Universitas Pertahanan Pada Usulan Gelar Pahlawan Nasional Di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia

^{1,2,3*,4} Oktaheroe Ramsi, Yudi Subiantoro, Hendra Manurung*, Yuliana Anggun Pertiwi,
⁵Rahmat Pannyiwi

^{1,2,3,4} *Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan RI*

⁵ *Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Pertahanan RI*

ABSTRACT

This article describes how the proposal for state awards given by the President to every Indonesian citizen or someone who has died is known as the awarding of the title of national hero. On November 20, 2024, 25 cadets of the Military History Bachelor's Degree from the Faculty of Defence Strategy, Indonesian Defence University accompanied by the Head of the Study Program, lecturers, and staff attended the 'Seminar on the Proposal for the Title of National Hero in the Name of Wongsonegoro' at the Faculty of Cultural Sciences, University of Indonesia. Mr. Wongsonegoro was born on April 20, 1897, and died on March 4, 1978. He was Deputy Prime Minister of Indonesia in the Ali Sastroamidjojo I Cabinet from 1953 to 1955 and Minister of Education and Culture of Indonesia from 1951 to 1952. In addition, during the preparation for Indonesian independence, he also joined the Investigating Committee for Preparatory Work for Indonesian Independence (BPUPKI), representing the city of Surakarta, together with Wuryaningrat, Sosrodiningrat, and Radjiman Wedyodiningrat. BPUPKI was an agency formed by Japan to prepare for Indonesian independence. This title is given to those who have rendered services and dedication and fought for the nation and state. This title is also given to those who have rendered services, dedicated, and fought for the nation-state. It revealed that the proposal to grant the title of National Hero to Mr. Wongsonegoro is a form of state appreciation given by the President to Indonesian citizens or someone who has died, for acts of heroism, devotion, philanthropy, and extraordinary eternal work to the nation and state.

Keywords: *Independence, Wongsonegoro, Leadershps, Statesmanship, Indonesia*

Sahabat Sosial

Jurnal Pengabdian Masyarakat

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana usulan penghargaan negara yang diberikan oleh Presiden kepada setiap warga negara Indonesia atau seseorang yang telah meninggal dunia yang dikenal dengan penganugerahan gelar pahlawan nasional. Pada tanggal 20 November 2024, 25 orang kadet S1 Sarjana Militer Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan RI didampingi oleh Ketua Program Studi, Para Dosen, dan Staf menghadiri kegiatan 'Seminar Usulan Gelar Pahlawan Nasional atas nama Wongsonegoro' di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Bapak Wongsonegoro lahir tanggal 20 April 1897 dan wafat 4 Maret 1978 adalah Wakil Perdana Menteri Indonesia Kabinet Ali Sastroamidjojo I pada tahun 1953 hingga tahun 1955 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pada tahun 1951 hingga tahun 1952. Selain itu pada masa persiapan kemerdekaan Indonesia, selanjutnya bergabung dengan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), mewakili kota Surakarta, bersama-sama dengan Wuryaningrat, Sosrodiningrat, dan Radjiman Wedyodiningrat. BPUPKI adalah badan yang dibentuk oleh Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Pada umumnya pemberian gelar ini hanya diberikan kepada mereka yang telah sangat berjasa, berdedikasi, dan berjuang untuk bangsa dan negara. Gelar ini juga diberikan kepada mereka yang telah berjasa, berdedikasi, dan berjuang untuk bangsa dan negara. Disimpulkan bahwa usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional bagi Bapak Wongsonegoro ini merupakan sebuah bentuk penghargaan negara yang diberikan oleh presiden kepada Warga Negara Indonesia (WNI) atau seseorang yang telah gugur atau meninggal dunia, atas tindakan kepahlawanan, pengabdian, darmabakti, dan karya abadi yang luar biasa kepada bangsa dan negara.

Kata kunci: Kemerdekaan, Wongsonegoro, Kepemimpinan, Negarawan, Indonesia

*Korespondensi: Hendra Manurung

*Email: manurunghendra2028@gmail.com

Sahabat Sosial

Jurnal Pengabdian Masyarakat

I. PENDAHULUAN

Tulisan ini dibuat bertujuan untuk menjelaskan bagaimana proses penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Bapak Wongsonegoro selama periode pergerakan nasional dan tumbuhnya nasionalisme di Indonesia yang merupakan fase penting perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah Belanda. Perbedaan tipe perjuangan dengan masa sebelumnya disebabkan pada masa tersebut mulai memanfaatkan eksistensi sejumlah organisasi modern sebagai basis perjuangan. Tidak lagi mengandalkan perjuangan secara fisik dan senjata, tapi melalui jalur pendidikan dan partisipasi aktif dalam parlemen. Pada masa itu sudah mulai tumbuh rasa persatuan (*unity*), berjuang mempertahankan kemerdekaan (*fighting together to defend independence*), dan senasib sepenanggungan akibat penjajahan berkepanjangan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda terhadap seluruh bangsa Indonesia dari Sabang hingga Merauke.

Kanjeng Raden Mas Tumenggung (K.R.M.T) Wongsonegoro lahir di Surakarta pada tanggal 20 April 1897. Lelaki yang lahir dengan nama Raden Mas (R.M) Soenardi ini merupakan putra dari pasangan Raden Ngabehi Gitodiprojo dan Raden Ajeng Soenartinah. Ayahnya sendiri bekerja di lingkungan istana sebagai abdi dalem panewu bagi Sri Susuhunan Pakubuwono X. Menurut Rohayati (2023), Wongsonegoro dilahirkan dari lingkungan kelas sosial priayi atau keluarga bangsawan Jawa (*aristocratic social class in Javanese culture*). Tentu saja, sebagai keturunan priayi, Wongsonegoro punya peluang pendidikan lebih besar dibanding anak keturunan pribumi lainnya. Di masa kecilnya bisa mengenyam pendidikan di *Frobel School* yang merupakan Taman Kanak-Kanak bagi anak-anak warga negara colonial Belanda dan keturunan priayi (*aristocrats*). Kemudian melanjutkan sekolah di jenjang Sekolah Dasar (*Europeesche Lagere School/ELS*). Setelahnya, Wongsonegoro kembali melanjutkan pendidikan di *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs* (MULO). Lulus dari MULO, Wongsonegoro dikirimkan menempuh studi ke Jakarta (Batavia) untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Sekolah Menengah Hukum (*Rechts School*).

Sahabat Sosial

Jurnal Pengabdian Masyarakat

Gambar 1. Wongsonegoro



Sumber: Kemendikbud (2023)

Setelah menyelesaikan studi pendidikan Hukum dari *Rechts School* memungkinkan Wongsonegoro kembali ke daerah asal Solo pada 1917 dan mendapat pekerjaan di *Landraad* Solo Jawa Tengah, setingkat Pengadilan Negeri (PN). Selanjutnya di tahun 1918, Wongsonegoro dipindahkan menjadi Sekretaris Pengadilan Negeri Solo. Tahun 1921, Wongsonegoro mendapat promosi jabatan menjadi Bupati Anom Jaksa Persidangan Perdata Gede sekaligus Ajun Kantor Kepatihan Solo. Sehubungan dengan kiprahnya di bidang Hukum dan keluarga bangsawan yang berasal dari lingkungan Keraton Surakarta Hadiningrat, ia diberi beasiswa belajar di Sekolah Tinggi Hukum (*Rechts Hogeschool*) dari Pemerintahan Kasunanan Surakarta. Pada tahun 1929, Wongsonegoro berhasil menyelesaikan tugas belajar dan memperoleh gelar akademik Sarjana Hukum (*Meester in de Rechten*).

Proses Pendidikan yang sedemikian cemerlang yang diperoleh memungkinkan Wongsonegoro mengawali pengembangan karir di wilayah Jawa Tengah. Tahun 1930, Wongsonegoro diangkat menjadi Bupati Nayaka bagian Pangreh Praja dan Kehakiman merangkap Hakim keluarga Sunan Paku Buwono. Selanjutnya di tahun 1939 hingga 1942, ia diangkat menjadi Bupati Sragen dengan nama Bupati Raden Tumenggung Djaksonogoro.

Sahabat Sosial

Jurnal Pengabdian Masyarakat

Lahir dan tumbuh di periode pergerakan nasional Indonesia, yang mana Wongsonegoro ikut tertarik aktif di dalamnya sebagai salah satu pemimpin pergerakan yang dihormati.

Pergerakan ini sejatinya merupakan bentuk protes terhadap penindasan kaum kolonial terhadap rakyat Indonesia (Gischa, 2020). Pada 7 Maret 1915, Wongsonegoro kemudian terlibat dalam pendirian organisasi kepemudaan Trigoro Dharmo bersama kawan-kawannya seperti Satiman Wirjosandjojo, Sutomo, Muslich, Mosodo, dan Abdul Rahman. Dalam organisasi ini, Wongsonegoro ditunjuk sebagai Wakil dari Ketua Satiman Wirjosandjojo. Organisasi ini menekankan pentingnya persatuan siswa-siswi pribumi dan kecintaan pada kebudayaan sendiri. Dalam perkembangan selanjutnya, Tri Koro Dharmo sendiri diubah menjadi *Jong Java* bertujuan untuk mengakomodir pemuda-pemuda di sekitar Jawa, Sunda, Madura, dan Bali. Selain itu, Wongsonegoro juga terlibat aktif dalam sejumlah organisasi kepemudaan, pergerakan nasional, dan politik (Depdagri, 1996: 73-74). Sepanjang 1920-1932, ia mengetuai Perkumpulan Kebudayaan Krida Wacana Solo, 1923-1924 memimpin Budi Utomo Cabang Solo sekaligus mengetuai Jong Java dan mendirikan Indonesia Moeda. Selanjutnya di tahun 1946 ia mendirikan Partai Indonesia Raya.

Peran kenegarawanan Wongsonegoro yang cukup penting ditandai dengan penunjukkan dirinya sebagai anggota dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau dikenal dengan '*Dokuritsu Junbi Cosakai*' yang didirikan 1 Maret 1945 (Sularto & Yunarti, 2010: 9-15). Pada badan yang diketuai dr. KRT Radjiman Wediodiningrat dengan wakilnya RP Suroso, Wongsonegoro bersama 66 anggota BPUPKI lainnya bekerja mempersiapkan berbagai hal terkait aspek-aspek politik, ekonomi, tata pemerintahan, dan hal-hal yang diperlukan dalam usaha pembentukan negara Indonesia merdeka. BPUPKI sendiri melakukan serangkaian sidang dengan membahas bentuk negara, konstitusi, dan landasan ideologi negara.

Dalam BPUPKI tersebut, Wongsonegoro juga masuk ke dalam Tim Kecil dari Sidang Panitia Perancang Undang-Undang Dasar pada 11 Juli 1945 yang diketuai Ir. Sukarno. Tim kecil ini beranggotakan tujuh orang yaitu Prof. Mr. Dr. Soepomo (ketua panitia kecil), Mr. Raden Achmad Soebardjo Djojoadisoerjo, Mr. Alexander Andries Maramis (anggota), Mr.

Sahabat Sosial

Jurnal Pengabdian Masyarakat

Raden Panji Singgih (anggota), Haji Agus Salim (anggota), Dr. Soekiman Wirjosandjojo (anggota), dan Mr. KRMT Wongsonegoro (anggota) sendiri.

Selanjutnya, hasil kerja tim kecil ini dibahas pada 13 Juli 1945 untuk selanjutnya dilaporkan pada sidang Pleno BPUPKI pada 14 Juli 1945. Dalam laporan tersebut, Ir. Sukarno menjelaskan rancangan Undang-Undang Dasar yang kelak disebut Undang-Undang Dasar 1945. Di dalamnya tercantum tiga hal pokok, yaitu Pernyataan tentang Indonesia Merdeka, Pembukaan Undang-Undang Dasar, dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar.

Salah satu usulan Wongsonegoro dalam sidang tim kecil itu adalah perlunya menambah frasa ‘dan kepercayaannya itu’ pada Pasal 29 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945 (Damami, 2011 & Rofiq, 2014). Diketahui, Pasal 29 ayat 1 berbunyi: “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sedang Pasal 29 ayat 2 berbunyi: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Mengutip Damami, keberadaan frase ini memungkinkan pemerintah Indonesia semenjak awal kemerdekaan memberikan pengakuan resmi kepada keberadaan para penganut Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana tertuang dalam UUD 1945. Dengan demikian, Wongsonegoro secara tidak langsung telah meletakkan dasar pentingnya kerukunan agama-agama dan aliran kepercayaan.

Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, selanjutnya kiprah Wongsonegoro semakin menonjol dalam pemerintahan yang baru terbentuk adalah ditunjuk menjadi Gubernur Jawa Tengah, menggantikan R.P. Soeroso, pada 13 Oktober 1945. Tugas ini dilaksanakannya hingga 13 Oktober 1949. Ia memimpin kawasan ini dengan berbagai dinamika wilayah mengingat masa ini merupakan periode revolusi kemerdekaan dimana Belanda mencoba kembali masuk dan menguasai Tanah Air. Bahkan di awal kepemimpinannya di Jawa Tengah, Wongsonegoro dihadapkan pada revolusi fisik yang melibatkan para pemuda tanah air dalam barisan Tentara Keamanan Rakyat (kelak menjadi Tentara Nasional Indonesia/TNI) dan balatentara Jepang. Peristiwa ini dikenal dengan ‘Pertempuran Lima Hari di Semarang’, Wongsonegoro sempat ditahan pihak militer Jepang. Lebih lanjut,

Sahabat Sosial

Jurnal Pengabdian Masyarakat

Wongsonegoro harus memimpin Jawa Tengah dengan berpindah-pindah daerah seperti ke Demak, Purwodadi, Magelang, Kedu dan sekitarnya menyusul berkecamuknya perang gerilya.

Setelah menyelesaikan tugasnya sebagai Gubernur Jawa Tengah, Wongsonegoro melanjutkan kiprah kebangsaannya di tingkat nasional. Kiprah ini ditandai dengan masuknya Wongsonegoro sebagai anggota sejumlah kabinet pemerintahan Indonesia yang terus berganti di masa itu (Simandjuntak, 2003). Masuknya Wongsonegoro dimulai ketika Muhammad Hatta membentuk Pemerintahan Kabinet Hatta II. Pada kabinet yang berlangsung sejak 4 Agustus-14 Desember 1949, Wongsonegoro ditunjuk menjabat Menteri Dalam Negeri mewakili Partai Indonesia Raya. Posisinya digantikan Ide Anak Agung Gde Agung Ketika Muhammad Hatta membentuk kabinet pemerintahan baru, Kabinet Republik Indonesia Serikat yang berlangsung sejak 20 Desember 1949 hingga 6 September 1950.

Namun Wongsonegoro kembali masuk dalam jajaran kabinet pemerintahan ketika Muhammad Natsir membentuk Kabinet Natsir 6 September 1950. Pada kabinet ini, Wongsonegoro menjabat Menteri Kehakiman. Ia masuk dalam jajaran kabinet ini bersama sejumlah tokoh nasional lain seperti Mohammad Roem (Menteri Dalam Negeri), Sjafrudin Prawiranegara (Menteri Keuangan), Bahder Johan (Menteri Pendidikan), R.P. Suroso (Menteri Pekerjaan Umum). Namun, Kabinet Natsir mendapat mosi tidak percaya sehingga jatuh pada Maret 1951 dan digantikan Perdana Menteri Sukiman Wirjosandjojo.

Pada Kabinet Sukiman-Soewirjo (April 1951–Februari 1952), Wongsonegoro tetap dipercaya berada dalam kabinet pemerintahan. Namun kali ini, ia harus meninggalkan pos Menteri Kehakiman untuk menempati pos baru sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), menggantikan Bahder Djohan. Pos kementerian ini ditinggalkan Wongsonegoro ketika Kabinet Sukiman digantikan Kabinet Wilopo 3 April 1952 hingga 30 Juli 1953. Namun Wongsonegoro kembali duduk di Kabinet Pemerintahan Ali Sastroamidjojo I (31 Juli 1953 hingga 24 Juli 1955). Pada pemerintahan ini, Wongsonegoro menempati posisi Wakil Perdana Menteri (mewakili Partai Persatuan Indonesia Raya) bersama Zainul Arifin (Nahdlatul Ulama) sehingga kabinet ini dikenal juga sebagai Kabinet Ali Sastroamidjojo-Wongsonegoro atau Kabinet Ali Sastroamidjojo-Wongso-Arifin.

Sahabat Sosial

Jurnal Pengabdian Masyarakat

Kabinet Ali Sastroamidjojo-Wongsonegoro sendiri memiliki sejumlah fokus kerja seperti mendorong stabilitas keamanan di dalam negeri, pembebasan Irian Barat, penegasan politik luar negeri bebas aktif, penyelesaian pertikaian politik, peninjauan kembali Perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB), dan penyiapan Pemilihan Umum 1955 (Thoha, 2014: 151-154). Situasi yang dihadapi kabinet ini sendiri sangat berat, selain persoalan ekonomi, di berbagai daerah juga muncul berbagai gerakan yang mengancam persatuan nasional seperti perlawanan Daud Beureueh di Aceh melalui Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) dan perlawanan Darul Islam pimpinan Kartosuwiryo di Jawa Barat. Prestasi penting kabinet ini sendiri adalah terlaksananya Konferensi Internasional Asia Afrika (KAA) di Bandung 18–25 April 1955 yang meneguhkan semangat negara-negara di Asia dan Afrika dalam melawan kolonialisme.

Setelah beberapa waktu terlibat dalam kabinet pemerintahan, Wongsonegoro selanjutnya lebih banyak terlibat dalam pengorganisasian para penghayatan kepercayaan (Aliran Kepercayaan/Kebatinan). Tahun 1955, ia mendorong penyelenggaraan Kongres Kebatinan tingkat nasional di Semarang. Tak kurang dari 70 aliran kepercayaan dari seluruh Indonesia hadir dan menyepakati berdirinya Badan Koordinasi Kebatinan Indonesia (BKKI). Pada kongresi itu, Wongsonegoro diangkat menjadi ketuanya. Pada kongres itu, Wongso memberikan penegasan tentang kedudukan aliran kepercayaan (Subagya, 2002: 42): “Agama dan Kebatinan (Kepercayaan): Kedua-duanya mempunyai unsur yang sama yaitu panembah (kebaktian kepada Tuhan Yang Maha Esa) dan budi luhur. Perbedaannya adalah hanya terdapat pada stress atau tekanannya. Bagi aliran tersebut, penekanan diberikan kepada panembah (Tuhan) sedangkan pada kebatinan memberikan tekanan pada tercapainya budi yang mulia dan kesempurnaan hidup”.

Kedekatan Wongsonegoro dalam aliran kebatinan terlihat dari kepribadian sehari-harinya. Wongsonegoro selalu menunjukkan sikap-perilaku terpuji seperti kesederhanaan, keselarasan, kejujuran, patriotisme, disiplin dan sangat religius hingga wafatnya pada tanggal 4 Maret 1978 dalam usia 81 tahun. Sikap perilaku semasa hidupnya dituliskan pada monumen makamnya di Astana Kandangan, Sukoharjo, yang berbunyi “*Janma Luwih Hambuka Tunggal*”,

Sahabat Sosial

Jurnal Pengabdian Masyarakat

yang berarti orang yang mempunyai kemampuan lebih akan selalu mendekatkan diri dengan Sang Pencipta. Selain itu, dituliskan juga “*Haruming Sabda Haruming Budi*”, yang berarti orang yang selalu bertutur kata baik dalam arti yang benar, menggambarkan pribadi orang yang berbudi luhur.

II. METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Gedung Auditorium Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat pada hari Rabu, 20 November 2024. Jumlah peserta kegiatan tersebut mencapai 150 orang. Tim Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) terdiri dari Ketua Program Studi (Kaprodin) S-1 Sejarah Militer, Dosen dan Staf Fakultas Strategi Pertahanan serta sejumlah Kadet Program S-1 Sejarah Militer. Instrumen yang digunakan terdiri dari alat tulis (ATK), laptop, dan kamera. Pengamatan lapangan, sosialisasi, diseminasi informasi terkait, dan diskusi interaktif yang dilanjutkan penyampaian edukasi kepada 25 orang Kadet Program Strata 1 Sarjana Militer yang diselenggarakan di Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambar 2. Kegiatan Sosialisasi



1. Hasil Kunjungan

Pada kegiatan sosialisasi dan pendampingan 25 orang Kadet S1 Program Studi Sarjana Militer Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan RI di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia teridentifikasi bahwa: Sejarah kepahlawanan Indonesia dapat diartikan sebagai perjuangan para Pahlawan dalam meraih dan mempertahankan

Sahabat Sosial

Jurnal Pengabdian Masyarakat

kemerdekaan Indonesia. Perjuangan para pahlawan ini mengajarkan nilai-nilai penting seperti keberanian, ketangguhan, dan semangat kebersamaan. Nilai-nilai ini dapat dipelajari, dipahami, dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari generasi muda Indonesia dalam mewujudkan ‘Indonesia Emas 2045’.

Gambar 3. Presentasi Narasumber



Hari Pahlawan menjadi bukti bahwa perjuangan meraih serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia melawan penjajahan colonial Belanda dan Jepang bukan hal mudah. Perjuangan pahlawan kemerdekaan mengusir penjajah telah menginspirasi para generasi penerus untuk terus menerus memiliki nasionalisme. Kesadaran nasionalis ini perlu ditanamkan sejak pada masa kanak-kanak hingga dewasa secara berkelanjutan.

Peran perjuangan Mr Wongsonegoro sebagai Wakil Residen Semarang hingga Gubernur Jawa Tengah Pertama sejak Indonesia merdeka, khususnya dalam melawan penjajahan kolonial Belanda perlu diapresiasi dan menjadi pertimbangan terkait dengan penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional dari Presiden Republik Indonesia dan jajarannya.

Sahabat Sosial

Jurnal Pengabdian Masyarakat

Gambar 4.

Para Dosen dan Kadet Cohort 1 Prodi S1 Sejarah Militar



2. Penyampaian Materi Monitoring dan Evaluasi

Hasil sosialisasi dan atau pendidikan kesejarahan bangsa dan kepahlawanan nasional dilakukan dengan diskusi atau tanya jawab interaktif bersama para peserta kegiatan yang hadir secara offline maupun online dari dalam maupun luar negeri.

Gambar 5. Kadet Cohort 1 Prodi S1 Sejarah Militar



Sebagian peserta dapat memahami dengan baik nilai-nilai keteladanan para pahlawan nasional sehingga nantinya masyarakat selalu menerapkan nilai-nilai kehidupan yang terus meneladani sikap dan perilaku baik dari pahlawan nasional serta memperoleh pembelajaran

Sahabat Sosial

Jurnal Pengabdian Masyarakat

dan pemahaman tentang Sejarah Bangsa (*History of Nations*) dan Kepahlawanan Nasional Indonesia (*Indonesian National Heroism*).

IV. KESIMPULAN

Pahlawan adalah seseorang yang terus melakukan suatu tindakan untuk mendapatkan pahala dari Tuhan Yang Maha Esa, bukan hanya sekedar mendapat pujian dari manusia. Tindakan para pahlawan di masa lalu seringkali didasari oleh kepentingan umum atau umat banyak, bukan hanya sekedar kepentingan pribadi. Misalnya, peran dan kontribusi K.R.M.T Wongsonegoro yang merupakan priyayi bangsawan Jawa untuk terus memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, pendidikan dan kesetaraan hak serta kewajiban bagi seluruh bangsa Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Tengah. Kontribusi perjuangan Wongsonegoro sebagai Wakil Residen Kota Semarang hingga menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah yang pertama. Kepemimpinan Wongsonegoro sangat mewarnai dan terlibat aktif dalam negosiasi dan diplomasi dengan para komandan militer Jepang. Wongsonegoro bahkan menjadi wakil Bung Karno untuk urusan administrasi pemerintahan daerah di Jawa Tengah. Namun, dalam ‘Pertempuran 5 Hari di Semarang’ yang menarasikan peristiwa perlucutan senjata Jepang di Kidobotai oleh rakyat Semarang dan sejumlah pemuda pejuang, telah mengakibatkan gugurnya dr Kariadi yang ditembak tentara Jepang saat bertugas hendak mengecek kebenaran peracunan tandon air minum Wungkal.

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Ucapan terima kasih kepada Bapak Dekan Fakultas Strategi Pertahanan (FSP) Universitas Pertahanan Republik Indonesia (Unhan RI), Mayor Jenderal TNI Dr. Oktaheroe Ramsi, S.I.P., M.Sc., beserta jajarannya sehingga pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dapat berjalan dengan baik sesuai harapan bersama.
2. Ucapan terima kasih kepada Bapak Dekan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB) Universitas Indonesia (FIB UI), Dr. Bondan Kanumoyoso, S.S., M.Hum., beserta jajarannya atas terselenggaranya kegiatan.
3. Ucapan terima kasih kepada Bapak Ketua Program Studi Ilmu Sejarah, Dr. Abdurakhman, M. Hum., beserta jajarannya atas terselenggaranya kegiatan.

Sahabat Sosial

Jurnal Pengabdian Masyarakat

4. Ucapan terima kasih kepada Kepala Dinas Sosial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta., beserta jajarannya atas terselenggaranya kegiatan.
5. Ucapan terima kasih kepada Keluarga Besar K.R.M.T Wongsonegoro yang mendukung terselenggaranya kegiatan acara.

DAFTAR PUSTAKA

1. Rosihan, A. (2009). *Sejarah Kecil Petite Histoire Indonesia*. Jilid 3. Jakarta, Indonesia: Kompas.
2. Ahmad Choirul Rofiq, A. C. (2014). Kebijakan Pemerintah Terkait Hak Sipil Penghayat Kepercayaan dan Implikasinya Terhadap Perkembangan Penghayat Kepercayaan di Ponorogo. *Jurnal Kodifikasia*, 8(1), 1-22.
3. Damami, M. (2011). *Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Periode 1973-1983: Sebuah Sumbangan Pemahaman tentang Proses Legalisasi Konstitusional dalam Konteks Pluralitas Keberagaman di Indonesia*. Jakarta, Indonesia: Kementerian Agama Republik Indonesia.
4. Departemen Dalam Negeri RI. (1996). *Departemen Dalam Negeri Dari Masa Ke Masa*. Jakarta, Indonesia: Perpustakaan Depdagri & CV Muara Agung.
5. Gischa, S. (30 Januari 2020). Pergerakan Nasional di Indonesia, Diawali Organisasi Budi Utomo. Kompas.com. https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/30/060000269/pergerakan-nasional-di-indonesia-diawali-organisasi-budi-utomo?lgn_method=google&google_btn=onetap
6. Kumalasari, D. (2020). *Pergerakan Nasional Dan Tumbuhnya Nasionalisme Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Press.
7. Rohayati, T. (2023). *File: Wongsonegoro. Sumber- ANRI. Katalog Daftar Arsip Foto Personal, No. P04-0212.jpg*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Jakarta, Indonesia.
8. Samroni, I. (2010). *Daerah Istimewa Surakarta*. Yogyakarta, Indonesia: Pura Pustaka.
9. Simanjuntak, P. N. H. (2003). *Kabinet-Kabinet Republik Indonesia: Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi*. Jakarta, Indonesia: Djambatan.
10. Subagya, R. (2002). *Kepercayaan dan Agama Kebatinan Kerohanian Kejiwaan*. Yogyakarta, Indonesia: Kanisius.
11. Sularto, St., dan Yunarti, D. R. (2010). *Konflik dibalik Proklamasi: BPUPKI, PPKI, dan Kemerdekaan*. Jakarta, Indonesia: Kompas.
12. Thoha, M. (2014). *Birokrasi Politik & Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta, Indonesia: Kencana.